

## PERAN VITAL BUDAYA DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK

Yaya Mulyana

Universitas Pasundan, Bandung

Email: [mulyana\\_yaya@unpas.ac.id](mailto:mulyana_yaya@unpas.ac.id)

### Abstrak

Kebijakan publik dikenal sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi suatu permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi kebijakan sebagai bentuk upaya kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di sisi lain kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi komplikasi dan menghasilkan insentif, namun terlepas dari semua itu kebijakan publik, apapun bentuknya, merupakan landasan hukum yang sah bagi pemerintah untuk mengambil suatu tindakan. dalam implementasi kebijakan di tingkat birokrasi sulit untuk dilaksanakan, karena banyak aktor yang berkepentingan untuk terlibat dalam proses implementasi kebijakan sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Sebab, kebijakan diimplementasikan dalam ruang yang penuh dengan berbagai aktor, kekuasaan, dan kepentingan. Kepentingan para aktor akan mempengaruhi apakah kebijakan tersebut akan didukung atau ditentang. Nilai-nilai budaya menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu kebijakan, mengingat masyarakat yang menjadi sasaran suatu kebijakan akan bereaksi terhadap suatu kebijakan sesuai dengan kerangka dan nilai-nilai yang dimilikinya.

**Kata Kunci:** Urgensi, Budaya, Kebijakan Publik.

### Abstract

*Public policy is known as the action taken by the government in response to an issue or phenomenon that is currently happening in society. Public policy like two sides of a coin, on the one hand policy as a form of a complex effort from the community for the benefit of the community, on the other hand policy is a technique or way to overcome complications and generate incentives, but apart from all that public policy, whatever its form, is a legal basis for the government to take something action. in implementing policies at the bureaucratic level it is difficult to implement, because there are many actors who have an interest in being involved in the policy implementation process so that the goals of the organization are not achieved. This is because policies are implemented in a space full of various actors, powers and interests. The interests of the actors will influence whether the policy will be supported or opposed. Cultural values are a determinant for determining the success of a policy, bearing in mind that the people who are the target of a policy will react to a policy in accordance with the framework and values they have.*

**Keywords:** Urgency, Culture, Public Policy.

### A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik atau (*public policy*) secara teoritis dalam ilmu administrasi publik dikenal sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Lebih jauh dari pada itu, aspek lain yang menjadi *driving force* mengapa sebuah kebijakan publik dibangun adalah berkaitan dengan aspek futuristik pemerintahan, yaitu untuk menjangkau capaian pembangunan ke depan yang

telah dituangkan dalam visi dan misi pemerintahan (Fajrianto, 2002).

Menurut Thoha dalam (Susi Sulandari dkk., 2014) Kebijakan public bagai dua sisi mata uang, disatu sisi *Policy* sebagai bentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, disisi lain *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi komplik dan menimbulkan insetif, namun terlepas dari itu semua bahwa kebijakan public, apapun bentuknya, merupakan suatu landasan hukum yang sah bagi pemerintah untuk mengambil suatu tindakan. untuk itu maka kebijakan publik haruslah dibuat dengan berbagai pertimbangan, agar kebijakan tersebut dapat di jalankan dan sesuai dengan tujuan yang di harapkan (Al Fatih, 2010). Kebijakan publik tidak bekerja dalam ruang hampa. Kondisi budaya masyarakat akan menentukan bekerja tidaknya sebuah kebijakan publik. Artinya, kinerja kebijakan publik akan baik apabila terdapat keselarasan antara substansi kebijakan dengan nilai-nilai budaya di wilayah yang menjadi target kebijakan.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dimana setiap warga negara dalam melaksanakan kegiatan atau aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat haruslah berdasarkan hukum, dimana dasar hukum tersebutlah yang dijadikan landasan sebagai pijakan dalam pelaksanaan pelyanan public, landasan hukum tersebut berbentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa.

Berbagai peraturan yang di keluarkan adalah merupakan refleksi dari kehendak politik dari para pemangku kebijakan negara atau lembaga negara. Untuk mengkaji kehendak politik suatu kebijakan publik yang dibuat oleh para pemangku kebijakan negara, paling tidak ada dua cara yang harus diketahui, yaitu kajian yang melihat isi kebijakan (*policy content*) dan kajian yang melihat bagaimana kebijakan sebenarnya dibuat dan dilaksanakan (*policy process*). Kajian isi kebijakan (*policy content*) kebanyakan berupa analisis legal-normatif (Ghafur, 2012).

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan juga haruslah selaras dengan pancasila dan tujuan dibentuknya negara sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Namun harus diakui bahwa kebijakan publik dalam tataran teoritis tidak jarang berlawanan dengan aspek realitas. Saat ini, banyak kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah seringkali terlihat diskrimantif terhadap warga negara yang rentan dan termarjinalkan, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan. Sebagaimana hal tersebut yang di sampaikan oleh (Geertz, 2002), “Keberhasilan seorang pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan yang strategis sangat tergantung pada pemahamannya mengenai konteks budaya dimana kebijakan publik itu akan dibuat dan diterapkan. Hal ini dikarenakan setiap perilaku, pandangan politik, dan kesadaran politik individu dalam suatu kelompok masyarakat ditentukan dengan nilai kebudayaan yang dimiliki”.

Perspektif birokratis memandang implementasi kebijakan publik sebagai proses yang cenderung bersifat linier, patuh pada rangkaian mekanisme, dan cenderung mekanistik. Padahal, kenyataannya, implementasi kebijakan publik tidak bersifat linier apalagi mekanistik. Keberhasilan implementasi kebijakan publik lebih banyak ditentukan melalui proses negosiasi, tawar-menawar, atau lobby untuk menghasilkan kompromi. Namun, kapasitas lembaga pelaksana tetap diperlukan untuk mengelola beragam kepentingan tersebut (Tachjan, 2006).

Proses birokrasi dan para birokrat diyakini akan dapat menerapkan kebijakan publik seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan publik tersebut. Padahal, sebenarnya kebijakan publik bersifat kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan publik yang bersifat *selfexecuting* atau dapat langsung diterapkan, tanpa prasyarat lainnya (Tachjan, 2006).

Manusia dalam menjalani hidupnya tidak bisa lepas dari pada orang lain, manusia senantiasa suka hidup berkelompok, dewasa ini kelompok yang dibentuk oleh banyak orang dengan memiliki tujuan sama disebut dengan konsep organisasi atau birokrasi, dimana organisasi tersebut haruslah di Gerakan sehingga munculah apa yang dinamakan dengan konsep administrasi dan konsep manajemen. Administrasi mengeluarkan kebijakan organisasi sedangkan manajemen melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam teori organisasi menyebutkan bahwa adanya budaya organisasi untuk keefektifan organisasi itu sendiri, baik sektor public maupun sektor privat dan sektor sosial (Masana Sembiring, 2011).

Kajian budaya memberi ruang gerak secara leluasa untuk merespons pergeseran konteks semacam itu. Hal ini menunjukkan pula adanya perubahan perspektif sebagai respons atas perkembangan yang terjadi di Masyarakat pada khususnya dan perkembangan secara global pada umumnya (Sutamat Arybowo, 2010). Budaya merupakan sebuah nilai yang hidup di Masyarakat yang dipahami dan ditularkan oleh pimpinanya kepada seluruh anggota organisasi mulai dari unit yang terendah sampai pada manajemen senior, hal tersebut dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan dari organisasi.

Dalam kerangka kebijakan, “konteks” budaya menunjukkan perilaku dan dinamika hubungan stakeholder lokal yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Budaya dapat memengaruhi perilaku dan cara berpikir para *stakeholder*. Budaya juga memengaruhi karakter lembaga-lembaga lokal, pola kekuasaan, dan dinamika antar aktor lokal (Grindle, 1980)

Sebagaimana yang di sampaikan oleh (Tachjan, 2006), bahwa dalam implementasi kebijakan dalam tataran birokrasi sulit dilaksanakan, karena banyaknya para aktor yang memiliki kepentingan terlibat dalam proses implementasi kebijakan sehingga tujuan dari organisasi tidak tercapai. Banyak kejadian di dalam proses implementasi kebijakan malah menimbulkan permasalahan, hal tersebut di sebabkan karena kebijakan diimplementasikan dalam ruang yang sarat dengan aktor, kekuasaan dan kepentingan yang bervariasi. Kepentingan para aktor akan mempengaruhi apakah kebijakan akan didukung atau dilawan. Aspek kebudayaan memberi pengaruh yang sangat besar pada kebijakan publik. (Donald Braman, Dan M. Kahan, 2006) mengungkapkan bahwa nilai-nilai budaya memiliki kekuatan yang besar dalam memengaruhi sikap, perilaku, dan cara pikir seorang anggota masyarakat.

Nilai-nilai kebudayaan merupakan determinan untuk menentukan keberhasilan kebijakan, mengingat bahwa masyarakat yang menjadi target kebijakan akan bereaksi terhadap suatu kebijakan sesuai dengan kerangka pikir dan nilai yang mereka miliki. Hubungan implementasi kebijakan publik dengan kinerja organisasi dapat diterangkan bahwa implementasi kebijakan berdampak pada kinerja kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Model implementasi kebijakan public yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Syafri dan Setiyoso (2008) yang lebih menekankan mekanisme memaksa ketimbang mekanisme pasar yang bersifat linear menuju sasaran akhir yaitu kinerja kebijakan.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian Zed dalam (Adlini dkk., 2022). data yang di dapat dari hasil penelusuran kepustakaan akan digali lebih dalam sehingga terlihat makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur yang lain (Rachmawati, 2020).

Beberapa alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan adalah: Pertama, data yang di dapatkan di selam nya berdasarkan data yang di peroleh di lapangan, tetapi adakalanya data tersebut di dapatkan melalui penelusuran kepustakaan baik berbentuk dokumen, hasil penelitian seperti jurnal, proiding atau dokrin, dan biasanya dalam bentuk tulisan. Kedua study kepustakaan dilakukan gna memahami fenomena atau isu yang terjadi yang belum di pahami, sehingga melalui stud pustakalah penulis dapat memahami fenomena tersebut. Dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut, sehingga dalam mengatasi suatu fenomena yang terjadi, peneliti dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Penggunaan data kepustakaan dalam penelitian sampai saat ini masih relevan dan banyak digunakan oleh banyak peneliti dalam menjawab fenomena yang terjadi (Rachmawati, 2020).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hakekat Budaya

Budaya yang dalam Bahasa inggri diarti sebagai “*Culture*”, adalah mengolah atau mengerjakan, sementara itu Selo Sumardjan, mengatakan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta Masyarakat. Didalam kajian budaya, bahwa budaya merupakan upaya untuk memahami perubahan yang terjadi. istilah kebudayaan berasal dari kata “budaya” yang berarti pikiran, akal budi, adat istiadat, yang menjadi kebiasaan yang di lakukan secara turun teumurun dan sering di lakukan di lingkungan masyarakat. Budaya berasal dari kata “*budh*” (tunggal) dan “*budhaya*” (majemuk), sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran manusia atau hasil akal manusia.

Budaya sebagai pola yang dapat di pahami maknanya dan yang tertanam dalam symbol yang di transmisikan secara historis yang merupakan sdbuah sistem secara turun teumurun yang di ekspresikan dalam bentuk symbolic yang digunakan orang untuk berkomunikasi dan bertahan hidup (Luddin, Abu Bakar, 2010). Manusia pada dasarnya mahluk yang hidupnya suka berkelompok, sehingga banyak kebiasaan khas yang terjadi dan muncul dari komunitas tersebut, hal ini menjalsakan bahwasannya manusia merupakan mahluk yang dinamis, berikut beberapa ciri budaya yang di sampaikan oleh Rafael (Raga Maran Rafael, 2007):

- a. Kebudayaan merupakan buatan manusia
- b. Kebudayaan bersifat sosial
- c. Kebudayaan di transmisikan melalui pembelajaran
- d. Kebudayaan bersifat simbolik, dan
- e. Kebudayaan sebagai sistem dalam pemenuhan kebutuhan

Sehingga hal tersebut dapat di simpulkan bahwa kebudayaan atau budaya merupakan nilai atau tata prilaku yang di jadikan sebagai pedoman oleh manusia atau masyarakat tertentu sehingga kebudayaan tersebut berkembang dari satu generasi ke generasi lainnya.

Dalam perkembangan kebudayaan dibeberapa negara tidak terlepasnya adanya pengaruh unsur besar dan kecilnya yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Berikut adalah beberapa unsur yang mempengaruhi dalam perkembangan suatu negara sebagai yang di sampaikan oleh Bronislw Malinowski (Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, 2015):

- a. Sistem norma yang berlaku dalam Masyarakat mungkin adanya Kerjasama yang dapat merubah lingkungan
- b. Organisasi Ekonomi
- c. Alat -alat negara yang merupakan Lembaga yang dapat memberikan Pendidikan kepada Masyarakat, dan
- d. Organisasi Kekuatan

Berdasarkan hal tersebut maka unsur kebudayaan mempunyai makna, bahwa unsur kebudayaan yang terjadi di masyarakat mencakup norma, kerjasama, agama, dan nilai yang

hidup di masyarakat, sehingga kebudayaan yang ada di masyarakat mempunyai wujud sebagai berikut: (Koentjaraningrat, 2015)

- a. Kebudayaan sebagai wujud kompleksitas yang terjadi di Masyarakat yang meliputi ide, gagasan, nilai norma dst
- b. Kebudayaan sebagai wujud dari aktifitas dari suatu Masyarakat, yang menjelma menjadi suatu pola dalam kehidupan bermasyarakat
- c. Kebudayaan sebagai produk yang di hasilkan oleh manusia melalui sebuah ide dasar yang kemudian tercipta menjadi sebuah karya

Wujud kebudayaan sebagai sesuatu yang kompleks dari ide gagasan, norma dan peraturan bersifat abstrak. Wujud kebudayaan keberadaannya di masyarakat tersebut serta ada dalam pikiran Setiap warga masyarakat. Kebudayaan ideal dapat pula disebut adat tata kelakuan atau biasa dikatakan adat-istiadat. Yaitu sebagai tata kelakuan yang mengatur mengendalikan dan memberi arah perbuatan manusia dalam masyarakat.

Perubahan yang terjadi di masyarakat yang merupakan perwujudan adanya pergeseran kebiasaan yang terjadi di Masyarakat merupakan suatu refleksi adanya kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup dari Masyarakat itu sendiri, namun adanya pergeseran saat ini tidak hanya terjadi pada ranah privat saja tetapi telah merambah ke ranah public dimana para penyelenggara cenderung melakukan perbuatan yang hanya dilakukan atas dasar adanya pengaruh dari lingkungan dimana dia bekerja, entah itu karena adanya tekanan, atau gaya hidup, yang jelas pergeseran tersebut telah mempengaruhi para penyelenggara dalam menjalankan suatu kebijakan. Hal ini semakin membuktikan bahwa budaya suatu organisasi dapat sedemikian mempengaruhi sebuah organisasi. Keberlangsungan suatu organisasipun sedikit-banyak terpengaruh oleh budaya organisasi. Sebagai contoh, budaya nepotisme di suatu organisasi atau perusahaan sudah tentu akan mengantarkan organisasi atau perusahaan tersebut ke gerbang kehancuran (Julinda et al., 2020).

Saat ini permasalahan yang terjadi akibat gagalnya suatu kebijakan karena implementasi kebijakan di pengaruhi oleh faktor budaya, dimana budaya mempengaruhi pola tingkah laku dari Masyarakat itu sendiri, seperti contoh permasalahan korupsi yang semakin meningkat dari tahun ketahun, menurut keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi , saat ini hampir mencapai 80% kepala daerah yang ada di Indonesia tersangkut masalah korupsi, bahkan beberapa menteri dan Ketua dan anggota DPR RI terkasut masalah yang sama , artinya bahwa budaya bukan saja dapat memberikan perubahan terhadap pola pikir yang lebih positif dalam mencapai karya dan karsa, namun budaya juga telah merubah pola hidup seseorang menjadi tidak terkendali, dan cenderung serakah dan hanya mengejar kepentingan pribadi dan golongan semata.

Dalam perilaku organisasi. Kekuasaan mengacu pada kemampuan untuk melakukan sesuatu atau memiliki otoritas dalam sebuah organisasi. Dalam dunia yang kompetitif, individu terus berjuang untuk kekuasaan dan kontrol atas diri mereka sendiri dan lingkungan. Iklim persaingan saat ini menuntut bahwa semua orang merasa kuat, terkendali, dan bersedia membantu dan membawa organisasi menuju puncak daya saing yang lebih besar. Ini dapat diartikan bahwa penyaluran kekuasaan pada umumnya dilakukan oleh segelintir orang ke banyak orang (dalam hal ini organisasi misalnya).

Budaya Organisasi adalah sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya yang diciptakan. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa.

Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi. Robbins mendefinisikan budaya organisasi sebagai

suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain (Robbins, 2002).

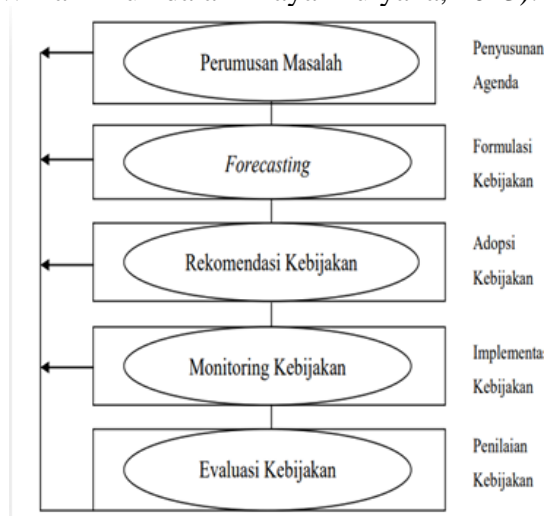
Berangkat dari sinilah lahir sistem kekuasaan (politik). Dengan demikian, kekuasaan itu sendiri merupakan produk budaya. Setiap bangsa memiliki sistem kekuasaan sendiri. Tetapi, sejarah merupakan proses dialogis yang melibatkan manusia dengan realitas kehidupan yang kompleks dan dinamis. Dalam perilaku organisasi. Kekuasaan mengacu pada kemampuan untuk melakukan sesuatu atau memiliki otoritas dalam sebuah organisasi. Dalam dunia yang kompetitif, individu terus berjuang untuk kekuasaan dan kontrol atas diri mereka sendiri dan lingkungan. Iklim persaingan saat ini menuntut bahwa semua orang merasa kuat, terkendali, dan bersedia membantu dan membawa organisasi menuju puncak daya saing yang lebih besar. Ini dapat diartikan bahwa penyaluran kekuasaan pada umumnya dilakukan oleh segelintir orang ke banyak orang (dalam hal ini organisasi misalnya). Untuk mewujudkannya dapat dilakukan melalui banyak cara, salah satunya adalah dengan peletakan standar yang tinggi dan harapan yang menuntut kerja sama dalam mendorong orang menuju perubahan. Pada situasi ini akan menempatkan pemimpin di garis depan, memberi contoh dengan menempatkan dirinya pada garis utama. Namun demikian, hubungan kekuasaan tidak selalu bersifat hierarkis.

## 2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak pernah muncul di “ruangan khusus”. Kebijakan publik sebagai studi bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah atau kebijakan public adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut (Riant Nugroho, 2014).

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat di pahami bahwa kebijakan public merupakan kebijakan yang dibuat oleh administrator publik, dan berfungsi untuk mengatur kehidupan publik, bukan untuk mengatur individu maupun golongan sehingga kebijakan public yang di dibuat harus memiliki tujuan untuk kemajuan Bersama.

Pemerintah merumuskan sebuah kebijakan karena didasarkan pada tujuan tertentu. Seperti halnya yang diungkapkan oleh (Rian Nugroho, (2011)) bahwa kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Dalam merumuskan kebijakan public merupakan serangkaian alam proses pembuatan kebijakan publik Nyang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Willam Dun dalam Yaya Mulyana, 2023).



**Gambar 1. Tahapan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik**

Dalam perumusan kebijakan public merupakan proses yang sangat kompleks banyak proses dan variabel yang harus di kaji dan juga banyak melibatkan pemikiran dari aktor aktor

di dalamnya yang tentunya memiliki keinginan dan pemikiran yang berbeda beda sehingga tak jarang dalam perumusan kebijakan publik di warnai dengan adanya sikap saling memaksakan satu sama lain, sehingga produk dari kebijakan public terkadang sulit untuk di implementasikan, sebagaimana hal tersebut di sampaikan yaya mulyana “Kebijakan publik tidak bekerja dalam ruang hampa. Kondisi budaya masyarakat akan menentukan bekerja tidaknya sebuah kebijakan publik. Artinya, kinerja kebijakan publik akan baik apabila terdapat keselarasan antara substansi kebijakan dengan nilai-nilai budaya di wilayah yang menjadi target kebijakan. Keberhasilan seorang pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan yang strategis sangat tergantung pada pemahamannya mengenai konteks budaya dimana kebijakan publik itu akan dibuat dan diterapkan. Hal ini dikarenakan setiap perilaku, pandangan politik, dan kesadaran politik individu dalam suatu kelompok masyarakat ditentukan dengan nilai kebudayaan yang dimiliki (Geertz, 2002)

Gagalnya suatu kebijakan dapat di implementasikan karena adanya ketidak selaras dalam merumuskan kebijakan tersebut, sehingga yang ada saling menyalahkan salah satu pihak terutama pembuat, pemberi dan pelaksana kebijakan dalam hal ini pemerintah, tapi kita juga harus cerdas dalam melihat dan mensikapi setiap kegagalan kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini dari berbagai hal, apakah betul program unggulan yang telah disusun dan disepakati oleh pemerintah untuk dilaksanakan itu salah dalam mengaplikasikannya, atau bahkan jangan-jangan kita sendiri sebagai masyarakat yang justru menjadi penyebab proses kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut karena kita tidak memahami serta tidak mampu dalam mensikapi kebijakan tersebut, atau bisa saja kesalahan itu terjadi karena adanya peran negara ketiga (asing) yang menjadi penyebab terhambatnya proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Semua indicator tersebut memungkinkan menjadi salah satu faktor penyebab gagalnya suatu proses kebijakan yang diterapkan, oleh karena itu setiap kebijakan publik seyogyanya dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan oleh semua pihak baik pemerintah, non pemerintah, maupun masyarakat, untuk secara bersama-sama melaksanakannya karena kebijakan merupakan petunjuk operasional kita dalam melaksanakan proses berbangsa dan bernegara (Sedarmayanti & Mulyana, 2020).

James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu. James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan Tindakan berorientasi pada tujuan,
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
- d. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu,
- e. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoratif)

Bila kita mengacu kepada pemahaman yang di sampaikan oleh James E. Anderson tentang kebijakan publik maka penulis berpendapat bahwa seluruh dinamika yang terjadi dalam proses pelaksanaan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah serta dilaksanakan oleh para pejabat-pejabatnya merupakan serangkaian kebijakan yang telah disepakati dan diputuskan untuk dilaksanakan menjadi suatu aturan tertulis, sehingga bagi siapapun yang melanggar akan diberi sanksi. Oleh karena itu maka baik buruknya kebijakan merupakan tanggung jawab pemerintah, sementara disisi lain masyarakat sebagai warga negara patut untuk

melaksanakan semua keputusan-keputusan atas kebijakan tersebut agar terjadi sinkronisasi antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks budaya dalam kebijakan publik hal ini semakin jelas bahwa dalam perumusan kebijakan public senantiasa dimengaruhi oleh beberapa faktor yang memang disebabkan adanya pengaruh dari lingkungan itu sendiri (Sedarmayanti & Mulyana, 2020). Dalam kerangka kebijakan, “konteks” budaya menunjukkan perilaku dan dinamika hubungan stakeholder lokal yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Budaya dapat memengaruhi perilaku dan cara berpikir para stakeholder. Budaya juga memengaruhi karakter lembaga-lembaga lokal, pola kekuasaan, dan dinamika antaraktor lokal. Kebijakan sangat ditentukan oleh kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, konten kebijakan harus mampu mengadopsi nilai-nilai religius dan adat kebiasaan masyarakat setempat.

#### D. KESIMPULAN

Kebijakan public bagai dua sisi mata uang, disatu sisi *policy* sebagai bentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, disisi lain *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi komplik dan menimbulkan insetif. Keberhasilan seorang pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan yang strategis sangat tergantung pada pemahamannya mengenai konteks budaya dimana kebijakan publik itu akan dibuat dan diterapkan. Hal ini dikarenakan setiap perilaku, pandangan politik, dan kesadaran politik individu dalam suatu kelompok masyarakat ditentukan dengan nilai kebudayaan yang dimiliki”.

Dalam kerangka kebijakan, “konteks” budaya menunjukkan perilaku dan dinamika hubungan stakeholder lokal yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Budaya dapat memengaruhi perilaku dan cara berpikir para stakeholder. Budaya juga memengaruhi karakter lembaga-lembaga lokal, pola kekuasaan, dan dinamika antar aktor local. Gagalnya suatu kebijakan dapat di implementasikan karena adanya ketidak selaras dalam merumuskan kebijakan, dalam konteks budaya dalam kebijakan public hal ini semakin jelas bahwa dalam perumusan kebijakan public senantiasa di pengaruhi oleh beberapa factor yang memang disebabkan adanya pengaruh dari lingkungan itu sendiri, “konteks” budaya menunjukkan perilaku dan dinamika hubungan stakeholder lokal yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Budaya dapat memengaruhi perilaku dan cara berpikir para stakeholder. Budaya juga memengaruhi karakter lembaga-lembaga lokal, pola kekuasaan, dan dinamika antaraktor lokal. Kebijakan sangat ditentukan oleh kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, konten kebijakan harus mampu mengadopsi nilai-nilai religius dan adat kebiasaan masyarakat setempat.

#### REFERENCES

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Al Fatih, A. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaay Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
- Arybowo, S. (2010). Kajian Budaya dalam Perspektif Filosofi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12(2), 209-230.
- Braman, D., & Kahan, M. (2006). Overcoming the Fear of Guns, the Fear of Gun Control, and the Fear of Cultural Politics: Constructing a Better Gun Debate. *Emory Law Journal*, 55(4), 570-606.
- Geertz, C. (2002). *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Ghafur, H. S. (2012). Relasi Kebudayaan dalam Kebijakan Publik dan Sistem Regulasi



- Negara. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 25(4), 263-270.
- Fajrianto. (2002). *Urgensi Penguatan Basis Kebudayaan dalam Pembentukan Kebijakan Publik*. Diakses dari: <https://www.terakota.id/urgensi-penguatan-basis-kebudayaan-dalam-pembentukan-kebijakan-publik/>
- Julinda Et.Al. (2020). Budaya Organisasi. *Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe*, 1-15.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Luddin, A. B. (2010). *Dasar-Dasar Konseling*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Mulyana, Y. (2023). Evaluation of Local Government Property Administration Policies. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(2), 73-81.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. .
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmawati, D. (2020). *Metode Penelitian*. Diakses dari: <http://repository.iainkudus.ac.id/7740/6/06.%20BAB%20III.pdf>
- Rafael, R. M. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta Indonesia.
- Robbins, S. P. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti, & Mulyana, Y. (2020). *Dinamika Governance di Era Revolusi Industri 4.0: dalam Teori dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sembiring, M. (2011). Pengaruh Budaya Organisasi dan Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Organisasi Pelaksana Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(3), 275-287.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulandari, S., & Rihandoyo, R. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 201-211.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung Bekerjasama Dengan Puslit Kp2w Lembaga Penelitian Unpad.